

SKRIPSI

**PERAN POPULARITAS TERHADAP ELEKTABILITAS PADA PEMILU
TAHUN 2019 INCUMBENT DPRD KABUPATEN MAJENE**

**HASRAWATI
F0116308**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP)
Pada Program Study Ilmu Politik**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2023/2024**

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERAN POPULARITAS TERHADAP
ELEKTABILITAS PADA PEMILU TAHUN 2019
INCUMBENT DPRD KABUPATEN MAJENE

NAMA : HASRAWATI
NIM : F0116308
PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK

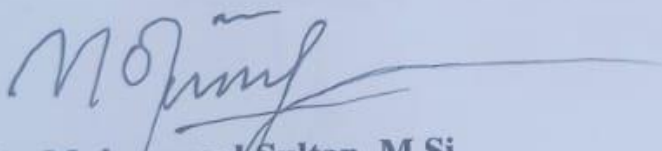
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan, guna memenuhi persyaratan untuk ujian akhir memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S1)


Majene, 02 Oktober 2021

Disetujui oleh,

Pembimbing I

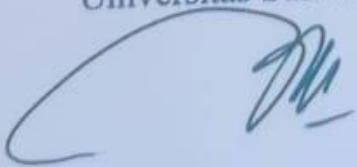
Pembimbing II


Dr. Muhammad Sultan, M.Si
NIP.19103282006041001


Muh. Yusri AR, S.IP., MA
NIDN:0010058202

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sulawesi Barat


Dr. H. Burhanuddin, M.Si
NIP 196209191989031004

SKRIPSI
PERAN POPULARITAS TERHADAP ELEKTABILITAS PADA PEMILU
TAHUN 2019 INCUMBENT DPRD KABUPATEN MAJENE

Dipersiapkan dan disusun oleh :

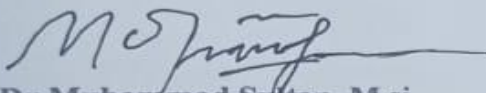
HASRAWATI
F0116308

Telah diujikan di depan Dewan Penguji

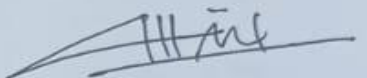
Pada tanggal 06 Juni 2023

Susunan Dewan Penguji :


Pembimbing I


Dr. Muhammad Sultan., M.si
NIP. 19103282006041001


Penguji I


Muhammmad S.IP,M.Si
NIP. 198707022015041001

Pembimbing II


Muhammad Yusri Ar.S.Ip,MA
NIDN:0010058202

Penguji II


Ahmad Amiruddin.S,Ip.MA
NIP.197103 2820006 04 1001

Penguji III


Pahruddin.M.S.IP.M.Si.
NIDN:0011017803

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERAN POPULARITAS TERHADAP
ELEKTABILITAS PADA PEMILU TAHUN 2019
INCUMBENT DPRD KABUPATEN MAJENE

NAMA : HASRAWATI
NIM : F0116308
PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK

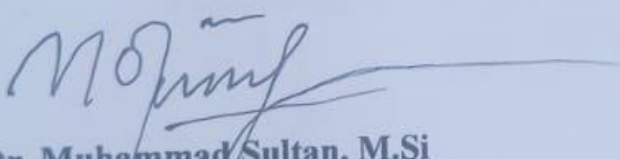
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan, guna memenuhi persyaratan untuk ujian akhir memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S1)

Majene, 02 Oktober 2021

Disetujui oleh,

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Muhammad Sultan, M.Si
NIP.19103282006041001


Muh. Yusri AR, S.IP., MA
NIDN:0010058202

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sulawesi Barat


Dr. H. Burhanuddin, M.Si
NIP 196209191989031004

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran popularitas terhadap *Elektabilitas* incumbent pada pemilihan umum legislatif Kabupaten Majene tahun 2019. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. pendekatan penelitian lapangan dilakukan dengan melihat dan mengamati apa yang terjadi dilapangan. penelitian ini menggunakan teknik *proposive sampling* penggunaan *proposive sampling* dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepopuleran *incumbent* mampu mempengaruhi tingkat keterpilihannya. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah *incumbent* yang berhasil terpilih kembali dan *incumbent* yang gagal terpilih kembali. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui penelitian analisis dan lapangan (*field research*), kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran popularitas *Incumbent* terhadap *Elektabilitas* pada pemilu 2019 DPRD Kabupaten Majene, belum sepenuhnya berhasil, karena masih ada beberapa (*Incumbent*) yang gagal terpilih kembali pada pemilihan umum tahun 2019. Seorang yang populer belum tentu layak untuk dipilih kembali dan seorang yang layak dipilih jika tidak populer atau dikenal maka orang tidak akan memilih. Jadi popularitas dan *Elektabilitas* saling mempengaruhi karna faktor yang mempengaruhi seseorang untuk dipilih yaitu dikenal (populer)

Kata Kunci: Popularitas, Elektabilitas, Incumbent

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum adalah adalah proses pemilihan orang –orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby dan lain-lain¹ kegiatan Dalam hubungannya dengan pengembangan demokrasi partisipasi masyarakat sebenarnya tidak hanya sebatas dalam menentukan pemimpinnya saja, tetapi juga menentukan proses demokrasi itu sendiri.

Calon *Incumbent* lebih mudah daripada calon baru karena mereka sudah lama bekerja dan bersosialisasi cukup lama, orang sangat mengenalnya. Popularitas hak untuk mendapatkan sumber daya kampanye, dan pengaruh birokrasi yang melekat pada pemegang kekuasaan merupakan aset politik penting dari kandidat saat ini.

Seseorang yang lebih dikenal luas, gerakan tersebut merupakan pengenalan lanjutan. Dalam kampanye pemilu, persoalan perencanaan akan menjadi perhatian serius para calon karena menyangkut kebutuhan banyak orang. Tentunya dalam hal ini, politisi akan selalu membaca situasi dan kondisi masyarakat pemilih agar rencananya bisa diterima pasar.

Pemilu legislatif 2019 kabupaten Majene telah selesai, hasil dari pemilu ini tentunya mempunyai cerita tersendiri bagi perseorangan calon legislatif yang maju

¹ Arifin anwar. pencitraan dalam politik, (jakarta : pustaka indonesia, 2006) hal. 39

pada pemilu tersebut. Semua calon legislatif yang maju pada pemilu legislatif 2019 tentunya mengharapkan dirinya bakal lolos dan mendapatkan jatah kursi di DPRD, begitupun halnya dengan calon *Incumbent* yang masih berharap kembali mendapatkan kesempatan duduk kembali di parlemen. Namun faktanya tidak semua harapan menjadi kenyataan, beberapa calon legislatif terkhusus beberapa *Incumbent* yang gagal mendapatkan kembali jabatannya

Obaervasi awal yang penulis lakukan dalam pencarian data terkait jumlah Petahana/*Incumbent* sebanyak 25 Orang. Jumlah Petahana/*Incumbent* yang terpilih kembali sebanyak 9 Orang Laki-laki. Sedangkan Petahana/*Incumbent* yang gagal meraih kursi terpilih yaitu sebanyak 16 Orang diantaranya 10 orang Laki-laki dan 6 Orang Perempuan.

Berdasarkan data dari KPU Majene dari Partai Gerindra, adalah calon petahana Taswin K Alatas yang meraih suara perseorangan tertinggi. Ia berhasil mengumpulkan 1.339 suara. Sementara di PSI, caleg pendatang baru, Rahmatullah yang meraih suara tertinggi perseorangan. Ia mendapatkan 1.411 suara.

Nasib kurang beruntung dialami Ketua Partai Nasdem Majene, Hasan. Calon petahana ini tersingkir da ri perebutan sepuluh kursi dapil 2 Majene. Partai yang dipimpin Hasan hanya meraih 1.053 suara dan berada di urutan tertinggi ke sebelas. Sementara Hasan secara perseorangan hanya mendapatkan 865 suara. Dengan demikian, Nasdem kehilangan kursi dari dapil 2 Majene.

Hal serupa juga dialami PKPI. Dua petahana yang berada di PKPI tak mampu bicara banyak di pemilu 2019. Perolehan suara PKPI hanya 1.142 dan

berada di urutan ke sepuluh. Namun tak mendapat satupun jatah kursi lantaran dua partai peraih suara tertinggi akan memboyong masing-masing dua kursi sekaligus. Di PKPI terdapat dua petahana anggota DPRD Majene. Yakni Rusbi Hamid dan Muhammad Tabri Tafif. Rusbi Hamid sebelumnya legislator PBB yang hijrah ke PKPI. Namun di PKPI, Rusbi Hamid hanya memperoleh 968 suara. Sementara, petahana anggota DPRD Majene dari PKPI lainnya, Muhammad Tabri Tafif hanya memperoleh 28 suara. Keduanya pun tersingkir dari perebutan kursi DPRD Majene dapil 2. Petahana lainnya yang juga kalah bersaing di dapil 2 yakni Fita Katta. Legislator Golkar ini hanya meraih 673 suara. Capaian itu hanya mengantarkannya sebagai peraih suara perseorangan tertinggi ketiga di Partai Golkar. Sementara partai berlambang pohon beringin hanya akan mendapatkan dua kursi. Sehingga Fita Katta harus legowo melepaskan kursinya untuk rekan separtai.

Berdasarkan deskripsi data hasil pemilihan umum legislatif 2019 kabupaten Majene diatas, menunjukkan bahwa petahana/*Incumbent* beberapa calon legislatif mampu mendulang suara tertinggi dalam pemilu legislatif. Dan data diatas juga menunjukkan bahwa tidak selamanya modal petahana/*Incumbent* sebagai jaminan dalam meraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif 2019. Terbukti bahwa berdasarkan data diatas, Rusbi Hamid dan Muhammad Tabri Tafif dari partai PKPI tidak mendapatkan jatah kursi lantaran suara yang diperoleh tidak memenuhi. Petahana lainnya yang juga kalah bersaing dari Legislator Golkar petahana Fita Katta, hanya mengantarkannya sebagai peraih suara perseorangan tertinggi ketiga di Partai Golkar. Sementara partai golkar hanya akan

mendapatkan dua kursi. Sehingga petahana Fita Katta tidak lolos pada pemilu legislatif tahun 2019.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana peran popularitas terhadap elektabilitas pada pemilu tahun 2019 *Incumbent* DPRD kabupaten Majene.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini adalah bagaimana peran popularitas terhadap *Elektabilitas* pada pemilu tahun 2019 *Incumbent* DPRD Kabupaten Majene?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran popularitas terhadap *Elektabilitas* pada pemilu tahun 2019 *Incumbent* DPRD Kabupaten Majene.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Bagi peneliti sendiri untuk mengembangkan konsep-konsep keilmuan khususnya wilayah ilmu politik yang berkaitan dengan peran popularitas terhadap *Elektabilitas Incumbent* DPRD pada pemilu tahun 2019 Kabupaten Majene.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para incumbenct, partai politik, masyarakat luas dalam memahami serta mengkaji berbagai faktor kemenangan *Incumbent* terutama untuk faktor

dan peran popularitas dalam memenangkan pemilihan anggota legislatif 2019.

1.5 Batasan Masalah

Adapun fokus penelitian dan tujuan penelitian ini pada tahun 2019 namun tetap penulis akan batasi untuk menghindari adanya perluasan masalah yang menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah penulis buat sebelumnya maka peneliti memberikan batasan masalah dengan penelitian akan difokuskan pada Incumbent DPRD Kabupaten Majene dengan melakukan penelitian di Sekretariat DPRD Kabupaten Majene yang memiliki domain Incumbent lumayan banyak yang berhasil masuk duduk kembali dalam pemilu Tahun 2019.

BAB II

Penelitian Terdahulu dan Kajian Teoritik

2.1 Penelitian Terdahulu

2.1.2 Strategi Kampanye Politik Calon Anggota Legislatif Incumbent DPRD

dalam Menghadapi Pemilu Legislatif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi kasus yang menggambarkan atau mendeskripsikan kasus yang sedang diteliti, subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan sumber informasi dalam pengumpulan data penelitian. Strategi adalah Pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. model penelitian yang digunakan adalah model kualitatif, teori yang digunakan yaitu menurut rogers dan storey, kampanye politik merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Menurut sharif dalam teori pertimbangan sosial ada tiga rujukan yang digunakan seorang untuk merespon atau stimulus yang dihadapi. Ketiganya merupakan bagian yang saling terkait yang pertama, rentang atau wilayah penerimaan, yang terdiri dari pendapat-pendapat yang masih dapat diterima dan ditoleransi. kedua, disebut rentang penolakan, dan yang terakhir disebut rentang ketidakterlibatan, yang terdiri dari pendapat atau pesan-pesan persuasive yang tidak kita tolak dan tidak kita terima.

pemilihan umum pada hakikatnya merupakan perwujudan hak-hak dasar politik rakyat, yaitu hak untuk ikut serta secara bersama-sama menentukan arah dan masa depan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai cara demokratis, pemilu akan memberikan kesempatan kepada orang untuk memilih dan meletakkan dasar untuk legitimasi mereka di Parlemen atau pemerintahan.²

Sejak reformasi tahun 1999, dalam tiga pemilu nasional terakhir (pemilu legislatif dan presiden), para ilmuwan telah memberikan bukti kuat bahwa determinan terpenting perilaku memilih di Indonesia telah bergeser ke faktor psikologis dan ekonomi politik (pilihan rasional). Jika pandangannya positif, pemilih cenderung memilih anggota DPR atau Parpol. Sebaliknya, jika pandangannya negatif, pemilih cenderung memilih calon yang dianggap anggota legislatif atau partai oposisi. Temuan ini sangat kontras dengan pandangan tradisional sebelumnya bahwa di Indonesia sebagian besar pemilih didorong oleh faktor agama, kedaerahan, ras, dan kelas sosial seperti model perilaku memilih secara sosiologis.³ Sebagian besar kandidat mengadopsi strategi politik yang sama, seperti menggunakan media sosial yang sama (baliho, iklan di media elektronik, dll.

Media komunikasi) untuk mensosialisasikan diri, rencana, visi dan misinya, serta meningkatkan kunjungan /pertemuan/ kebersamaan dengan orang Tamu, tim sukses, gerakan, debat publik, lakukan "politik uang". Lantas, faktor penentu

² Yanto (2014), *Strategi Kampanye Politik Calon Anggota Legislatif Incumbent DPRD dalam Menghadapi Pemilu Legislatif*. Jurnal Komunikasi dan Administrasi Politik.

³ R. William Liddle (2012), *Demokrasi dalam Tantangan*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi. hlm.155.

mana yang sebenarnya membuat pilkada pasca-konflik menang. Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya perlu dilakukan penelitian yang mendalam dan obyektif dengan mengkaji siapa yang seharusnya memimpin daerah dari aspirasi pemilih (di tingkat politik akar rumput) dan faktor apa saja yang sebenarnya. Ini penting untuk menentukan kemenangan kandidat

2.1.3 kripsi yang dilakukan oleh saudari Marlini Tarigan Mahasiswi Universitas Diponegoro Program Pascasarjana Ilmu Politik Tahun 2009 yang berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Temanggung Dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2008”.¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan data bahwa tingkat partisipasi politik warga Temanggung amatlah menunjukkan data bahwa tingkat partisipasi politik warga Temanggung lompat tinggi yaitu mencapai 86,50%. Angka ini adalah yang tertinggi kedua di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian dilakukan di Kabupaten Temanggung pada gelaran pesta demokrasi Pilkada menjadi sebuah bukti bahwa tingkat partisipasi di Kabupaten ini tinggi meskipun pada era sekarang ini angka golput juga semakin tinggi. Dari hasil penelitian dilakukan maka memperoleh kesimpulan bahwa indikasi Tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat setidaknya dipengaruhi oleh 3 aspek utama yaitu popularitas calon, status sosial ekonomi dan kondisi sosial politik. ¹⁵Marlini Tarigan, Tesis Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. 2009. Tesis Tidak diterbitkan. ¹⁸ Berdasarkan hal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian saudari Marlina dengan penulis. Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji terkait pilkada, sementara perbedaannya

yaitu hasil penelitian saudara Marlina mengkaji partisipasi politik masyarakat sedangkan yang peneliti lakukan mengkaji perilaku politik masyarakat.

2.1.4 Skripsi yang dilakukan oleh Muryanto Amin Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Tahun 2016 yang berjudul “Hubungan Tingkat Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Etnis Tionghoa Pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung Pada Tahun 2005 Kota Medan Di Lingkungan VI Kelurahan Pusat Pasar Medan”.¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang serius antara pengaruh tingkat ekonomi dengan partisipasi politik warga etnis Tionghoa di kota Medan. Tingkat ekonomi diartikan sebagai salah satu status sosial dalam masyarakat dimana ketika masyarakat telah memperoleh kematangan ekonomi maka akan berdampak pada pola pemikiran. Dimana mereka lebih aktif memberikan pengaruh dan kontribusi politik baik secara langsung maupun tidak langsung dari pada masyarakat yang mempunyai status ekonomi rendah. Berdasarkan hal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian saudara Muryanto dengan penulis. Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji terkait pemilihan kepala daerah, sementara perbedaannya yaitu hasil penelitian saudara Muryanto mengkaji

¹⁶Muryanto Amin, Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, 2006, Skripsi Tidak diterbitkan. ¹⁹ partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa sedangkan yang peneliti lakukan mengkaji perilaku politik masyarakat.

2.1.5 Skripsi yang dilakukan oleh Hasan Abdillah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syariah Jurusan Tata Negara Tahun 2009, dalam

penelitiannya yang berjudul “Money Politik Dalam Pilkadaes Tegal Ampel Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Islam”.¹⁷ Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Money Politik adalah salah satu aspek yang tidak bisa dilepaskan dalam pelaksanaan pesta demokrasi sistem otonomi yang digadang-gadang membawa perubahan baru dalam dinamika politik Indonesia telah menjadi salah satu momen yang ikut melanggengkan kekuasaan dan praktik money politik tersebut. Banyak faktor yang ikut mempengaruhi lahirnya praktek Money Politik seperti faktor politik, faktor ekonomi dan faktor budaya. Dan dalam penelitian tentang peran Money Politik dalam Pilkadaes Desa Tegal Ampel, peranan para Tim Sukses maupun botoh (Jawa) menjadi kunci pokok dimana Money Politik menjadi salah satu kunci penggerak bagi warga agar mampu berpartisipasi langsung dalam agenda pemilihan pilkades tersebut. Berdasarkan hal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian saudara Hasan dengan penulis. Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji terkait pilkades, sementara perbedaannya yaitu hasil penelitian saudara Hasan mengkaji money politik ¹⁷Hasan Abdillah, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA) Yogyakarta, 2009, Skripsi tidak diterbitkan. 20 dalam perspektif hukum Islam sedangkan yang peneliti lakukan mengkaji perilaku politik masyarakat.

2.1.6 Penelitian Terdahulu berpus skripsi Oleh Erwin Pasaribu, dengan judul penelitian Pola Rekrutmen Calon Legislatif 2019 Oleh Partai Solidaritas Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera, mengemukakan bahwa berdasarkan analisis yang dilakukan didalam penelitian, rekrutmen caleg DPRD

Sumatera Utara yang dilakukan oleh DPW PSI Sumatera Utara adalah rekrutmen yang dilakukan secara terbuka, kemudian dilakukan juga berbagai tahapan seleksi untuk melihat potensi-potensi dari calon tersebut apakah memenuhi kriteria kepemimpinan. Dilakukan juga pendidikan politik serta berbagai pelatihan untuk kader yang kemudian diseleksi dan dipersiapkan untuk menjadi calon anggota legislatif, ada 3 tahapan seleksi untuk menetapkan calon anggota legislatif yaitu evaluasi dokumen, evaluasi kompetensi, dan evaluasi sosialisasi. Dalam beberapa tahapan tersebut dilibatkan juga tim seleksi yang terdiri dari akademisi, LSM, dan jurnalis yang bertujuan untuk membuat proses rekrutmen yang dilakukan oleh DPW PSI Sumatera Utara menjadi rekrutmen yang terbuka dan transparan kepada masyarakat. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian diatas menganalisis bagaimana pola rekrutmen terhadap calon anggota legislatif di wilayah Sumatera Utara, tepatnya di DPW PSI Sumatera Utara. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah di wilayah DKI Jakarta, di DPW PSI DKI Jakarta. Perbedaan wilayah ini yang membuat penelitian akan memiliki hasil yang dapat jauh berbeda dikarenakan karakteristik daerah, begitu juga karakter dari pimpinan partai di daerah masing-masing, hingga perbedaan masyarakat dan kriteria kepemimpinan dari calon anggota legislatif membuat kebijakan pola rekrutmen dapat berbeda. Penelitian yang penulis lakukan akan fokus pada pola rekrutmen yang dilakukan Partai Solidaritas Indonesia, dari mulai proses rekrutmen kader hingga rekrutmen calon anggota legislatif, penulis juga akan fokus pada tantangan dan hambatan melakukan pola rekrutmen calon anggota legislatif di DPW PSI DKI Jakarta.

2.1.7 Penelitian relevan terdahulu lainnya, Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dari Partai Golkar Untuk DPRD Jateng Periode 2014-2019 oleh Teguh Adi Prasajo. Mengemukakan bahwa rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi partai politik yang sangat berarti bagi kehidupan demokrasi. Salah satu rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik adalah rekrutmen calon legislatif. Dalam hal melakukan rekrutmen politik, ada berbagai pola yang dilakukan oleh partai politik. Dalam penelitian ini dibahas pola rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Golkar, seperti yang kita ketahui bahwa Partai Golkar adalah salah satu yang telah terbukti baik melakukan proses rekrutmen, banyak kader berkualitas yang pernah dimiliki oleh partai Golkar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara untuk salah satu anggota tim seleksi dan beberapa calon legislatif yang telah terdaftar dalam Daftar Caleg Sementara (DCS). Dengan metode penelitian ini ada beberapa informasi yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan yaitu khususnya DPD Golkar Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan lebih kepada calon internal partai dibandingkan dengan calon dari luar partai. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa mekanisme rekrutmen DPP Partai Golkar sampai ke DPRD Kabupaten/Kota telah terangkum dalam keputusan DPP. Berdasarkan hasil penelitian ini pun bisa akhirnya menyimpulkan bahwa pola rekrutmen caleg dilakukan oleh DPD Golkar Jawa Tengah sudah terbuka. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah perbedaan partai politik yang melakukan rekrutmen beserta wilayahnya. Dengan begitu, dapat dilihat bagaimana perbedaan pola rekrutmen partai Golkar, partai

yang sudah berdiri sejak lama dengan Partai Solidaritas Indonesia yang terbilang baru dan pertama kali mengikuti pemilu di tahun 2019. Ketiga; Penelitian

2.2.8 Penelitian relevan terdahulu lainnya, Pola Rekrutmen Pemilihan Calon Anggota Legislatif oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi Perjuangan) Menjelang Pemilu 2014 di Kota Semarang oleh Hendri Ariwibowo, Budi Setiyono, Ph.D , Dra. Rina Martini, M.Si, mengemukakan bahwa pola rekrutmen calon anggota legislatif untuk pemilu 2014 yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Semarang atas perintah DPP Partai. Dengan aturan dan perintah tersebut, bahwa pola rekrutmen calon anggota legislatif harus melalui proses pendaftaran, penjaringan, test administrasi, penyaringan dan penugasan hingga melakukan tes untuk mengetahui sejauh mana calon anggota legislatifnya mendalami ideologi partai. Yang membedakan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah perbedaan partai politik yang sangat berbeda. PDIP sebagai partai lama dan tua tentunya sudah memiliki pola rekrutmen yang kuat dan menjadi pedoman selama bertahun-tahun partai itu berdiri, dan terbukti memiliki kader dan pengurus yang kuat berkat pola rekrutmen tersebut. PSI sebagai partai yang terbilang baru, tentu harus mencari terobosan baru dalam pola rekrutmen, PSI harus berani menunjukkan kepada masyarakat sistem rekrutmen yang mereka miliki mampu menjawab persoalan kepemimpinan di tingkat daerah dan nasional

2.2 Kajian Teoritik

Dengan makin dekatnya pemilu, makin banyak saja orang menjajakan diri untuk dipilih jadi anggota DPRD. Berhasilkah mereka? Jawabannya, lihat dulu seberapa besar mereka punya popularitas, *ekseptabilitas*, dan *Elektabilitas*.

Faktor popularitas (terkenal) *ekspektabilitas* (diterima), dan *Elektabilitas* (Dipilih). Adalah modal amat sangat penting calon dalam pemilihan pemilu. Sekalipun berdiri sendiri, ketiga faktor itu terintegrasi jadi satu urutan gradasi nan tak terpisahkan. Itulah yang harus dirai para calon legislatif. Bila tidak tak baklan mereka merasakan empuknya kursi DPRD itulah proses yang tak boleh ditawar sepeser

1. Pengertian Popularitas

Popularitas adalah suatu penomenal sosial tentang presepsi kolektif masyarakat, yang menentukan siapa yang paling banyak dikenal orang. Melalui berbagai sarana, seseorang bisa meraih popularitas, baik cepat atau lambat. Semakin banyak dikenal semakin populer Namanya.

Popularitas berarti ketenaran Kata populer berasal dari bahasa latin *populus* yang artinya mayoritas orang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata "pop" adalah

- (1). Dikenal dan disukai banyak orang;
- (2). Sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum, banyak orang dapat dengan mudah memahaminya
- (3). Itu disukai dan dikagumi oleh banyak orang.⁴

⁴ Vivi Gusriani R. Pohan, *Pemecahan Konflik Interpersonal Pada Remaja yang Populer*. Sumatera Utara, hlm.10.

Didunia politik dan di era pemilihan langsung saat ini, popularitas tampaknya juga telah menjadi salah satu perhatian tersendiri. Banyak partai politik di Indonesia saat ini yang melihat popularitas sebagai “magnet” dalam mengangkat elektabilitas partainya. Tak heran, partai politik pun seakan berlomba-lomba memenangkan orang-orang yang dianggap memiliki popularitas tinggi. Baik kalangan selebriti, pejabat, penggiat sosial, pengusaha dan profesi lainnya

Terkait Popularitas, Robert B. Zajonc (1968) telah melakukan penelitian dengan cara memperlihatkan foto-foto wajah pada subjek-subjek eksperimennya. Ia menemukan bahwa makin sering subjek melihat wajah tertentu, ia makin menyukainya. Penelitian ini melahirkan hipotesis “mere exposure” (terpapar saja). Hipotesis ini dijadikan sebagai landasan ilmiah akan pentingnya repetisi pesan dalam mempengaruhi dan pendapat (Rahmat, 2008:115). Jadi tak bisa dipungkiri juga, bahwa popularitas sangat berperan dalam menentukan minat dan pilihan masyarakat. Namun disisi lain, popularitas yang hanya dilandasi integritas semu, tak akan mencapai hasil maksimal ditengah masyarakat yang kian cerdas. Terbukti akhir-akhir ini indikator tersebut kian tampak, terutama dalam pemilihan-pemilihan diberbagai pelosok tanah air akhir-akhir ini. Dalam perjalanannya, hal ini kemudian tampaknya mulai menimbulkan ketakutan banyak pihak khususnya di bidang politik. Dimana, politik yang hanya berbasis popularitas di Indonesia yang sedang marak saat ini bisa saja berpeluang besar memunculkan pemimpin instan, tidak kompeten, dan miskin integritas. Calon-calon Pemimpin yang belum “matang”, namun populer karena berbagai faktor, bisa saja muncul

sebagai pemenang. Mengalahkan calon terbaik dari segi aksetabilitas, karena kalah populer dimasyarakat

Kata "populer" atau "populer" diambil dari bahasa Latin "popularis", yang artinya secara umum atau sangat populer. Beberapa sumber mengatakan bahwa popularitas berarti disukai banyak orang, diperhatikan, dan dihargai. Namun, popularitas itu sendiri tidak didefinisikan dengan jelas. Popularitas tidak selalu terjadi pada manusia. Banyak hal lain yang juga bisa dipopulerkan, seperti makanan, lokasi, dll.

Sejak tahap awal kehidupan, orang sudah mengenal fashion. Popularitas secara alami terjadi di lingkungan seseorang. Ini sesuai dengan kata "primus inter pares", "primus inter pares" adalah kata lama yang berarti yang pertama dari jenisnya. Artinya, orang populer muncul di lingkungan dengan derajat yang sama, tetapi seseorang menunjukkan kelebihanannya sendiri, sehingga menjadi berbeda dan menarik perhatian.

Popularitas sangat terkenal, yang artinya walaupun banyak orang mengenal kata "populer", dapat dilihat dari pengertian konsep populer tidak pasti, akan tetapi makna "populer" sangat digemari banyak orang. Kata populer memang dapat digunakan dalam banyak hal, seperti makanan, tempat dan lain-lain, namun telah diketahui secara luas bahwa kata populer banyak digunakan untuk meramal keadaan seseorang atau sering digunakan pada manusia. Oleh karena itu, banyak remaja dewasa ini yang menggunakan kata "populer" dalam segala hal yang menurut mereka layak mendapat predikat, terutama bagi mereka yang disukai dan diberi label "populer / populer".

Jika seseorang dapat melihat hubungannya dengan lingkungan sosial dengan menerima atau menolak setiap orang atau kelompok sosial, seperti berinteraksi dengan teman, maka dia berhasil. Pada saat yang sama, popularitas saat ini digunakan sebagai alat untuk mengukur kemampuan pribadi untuk membuktikan kemampuan individu dalam menjalin hubungan sosial.

Popularitas adalah suatu fenomena sosial tentang persepsi kolektif masyarakat, yang menentukan siapa yang paling banyak dikenal orang. Melalui berbagai sarana, seseorang bisa meraih popularitas, baik cepat atau lambat. Semakin banyak dikenal semakin populer namanya.

2. Jenis Popularitas

Ada beberapa macam popularitas, sosiometrik, pengukuran sosial, dan perceived

a. Popularitas Sosiometrik

Popularitas sosiometrik muncul dari daya Tarik individu, yang disukai karena berbagai sifat baiknya. Misalnya, karena dia memiliki kemampuan personal, memiliki empati dan sering membantu orang lain.

b. Popularitas Pengukuran Sosial

Popularitas pengukuran sosial dapat didefinisikan sebagai seberapa banyak seseorang menyukai seseorang. Keinginan ini terkait dengan perilaku pro-sosial. Mereka yang bertindak dengan cara yang pro-sosial sering dianggap lebih populer dalam sosiologi. Mereka biasanya dikenal karena perilaku interpersonal, kasih sayang terhadap orang lain, dan kesediaan untuk tidak bekerja sama secara aktif. Seperti Borch dan Casey; Allen Hyde,

Antonius H. N. Cillessen, ini adalah penilaian yang lebih pribadi, yang ditandai dengan karakteristik yang menyenangkan dan biasanya tidak dibagi ke dalam kelompok pengawasan.

c. Popularitas *Perceived*

Popularitas *perceived* menggambarkan keterkenalan individu tanpa memiliki korelasi positif dengan sifat baik seperti halnya sosiometrik. berguna untuk mendeskripsikan orang yang disebut populer di antara teman sebaya. Tidak seperti popularitas sosial, popularitas ini biasanya dikaitkan dengan sikap agresif dan sebagian besar tidak bergantung pada perilaku prososial. popularitas *perceived* terkenal tapi jarang disukai karena reputasinya yang kurang positif dan merugikan, Contohnya, terkenal karena kasus korupsinya, arogansinya dan perilaku minor lainnya. Seperti Anthony Cillessen (Cillessen); Amanda J. Rose (Amanda J. Rose) dalam studinya yang bertajuk "Memahami Popularitas dalam Sistem Sejawat", orang merasa bahwa popularitas terlihat sangat sosial, sering ditiru tetapi jarang disukai.⁵

3. Indikator popularitas

Popularitas itu sendiri tidak mutlak. Seseorang terkadang disukai dan populer, tetapi di lain waktu, popularitasnya akan memudar dengan perubahan popularitas, menjadi indikator kelompok tersebut. Melihat keunggulan popularitas tersebut, tidak mengherankan jika banyak remaja mengadopsi berbagai cara untuk mempertahankan popularitasnya.

⁵ Alia Nur Fitri (2016), *Survei Korelasi Antara Motivasi Pencarian Popularitas dan Perilaku Berinstagram*. Yogyakarta, hlm.16.

Igall dan Lindzey mengemukakan dalam buku "Resolving Interpersonal Conflicts in Adolescents" terbitan Vivi Gusrini R Pohan bahwa daya tarik fisik, kecerdasan, keramahan dan keramahan juga menentukan popularitas seseorang. Selain itu, sebagian orang meyakini bahwa selain status sosial dan pendidikan orang tua, fasilitas dan material seseorang juga mendukung prestise mereka. Menurut Grinder, ini menunjukkan bahwa popularitas seseorang dapat diraih, baik karena pencapaian yang diraih atau karena diberikan (dikaitkan dengan popularitas yang diberikan ini, misalnya, memiliki pakaian, mobil, Uang, tahta, jabatan, dan kekayaan lainnya).

Sesuai dikatakan popularitasnya tinggi belum tentu *Elektabilitas* tinggi. Popularitas adalah tingkat keterkenalan dimata publik. Meskipun populer belum tentu layak dipilih. Sebaliknya meskipun punya *Elektabilitas* sehingga layak dipilih tapi karena tidak diketahui publik, maka rakyat tidak memilih.

Popularitas (*popularity* = terkenal) dan *Elektabilitas* (*electability* = tingkat keterpilihan) sama sekali berbeda, hanya yang satu dengan lainnya, saling mendukung (udianto.2013).

"Popularitas" Vivi Gusrini R Pohan membagi lima atribut dasar popularitas, di mana atribut kelima adalah kepopuleran yang diberikan (dikaitkan dengan).

Atribut tersebut adalah

- (1) kualitas pribadi dan wajah tampan. Dan rapi;
- (2) berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kegiatan olahraga kelompok yang sesuai, dan berstatus sebagai berikut:
- (3) Prestasi akademik yang baik:

(4) berteman dengan orang yang "tepat", hubungan interpersonal yang buruk dan teman dekat

(5) Memiliki kekayaan materi. uang. Mobil, pakaian, rumah indah, dll.⁶

4. Aspek-aspek Popularitas

Sigall & Lindzey mengemukakan dalam buku "Menyelesaikan Konflik Interpersonal di Kalangan Remaja Populer" karangan Vivi Gusrini R Pohan bahwa daya tarik fisik, kecerdasan, keramahan dan keramahan juga menentukan popularitas seseorang. Selain itu, sebagian orang meyakini bahwa selain status sosial dan pendidikan orang tua, fasilitas dan material seseorang juga mendukung prestise mereka.

Menurut Grinder, ini menunjukkan bahwa popularitas seseorang dapat diraih, baik karena pencapaian yang diraih, atau karena diberikan (dikaitkan dengan popularitas yang diberikan ini, misalnya, memiliki pakaian bagus, Mobil, uang, tahta, jabatan, dan kekayaan lainnya).

"Popularitas" Vivi Gusrini R Pohan membagi lima atribut dasar popularitas, di mana atribut kelima adalah popularitas yang diberikan (dikaitkan dengan). Atribut tersebut adalah

- (1) kualitas pribadi dan wajah yang tampan. Dan rapi;
- (2) Kegiatan sosial dan kegiatan olahraga, mengikuti kelompok yang sesuai dan berstatus
- (3) Prestasi akademis yang baik:

⁶*Ibid*

(4) Berteman dengan orang yang "tepat", hubungan interpersonal yang buruk, teman dekat

(5) memiliki kekayaan materi. uang. Mobil, pakaian, rumah indah, dll.

2.2 Petahana/*Incumbent*

Petahana berasal dari kata "tahana" yang berarti status, kebesaran atau kemuliaan. jika mengacu pada pemegang jabatan politik. *Petahana/Incumbent* adalah orang yang sedang memegang sebuah jabatan. Meskipun istilah tersebut berlaku untuk orang yang memegang posisi setiap saat, Istilah ini lebih sering digunakan sebelum pemilihan umum, sebagai cara untuk membedakan dua kandidat dalam kasus dimana pemegang posisi saat ini mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. ketika terjadi persaingan antara pasangan calon petahana dan non-petajana.⁷ Orang yang melawan petahana disebut sebagai penantang.

Memegang posisi *Incumbent* dapat dianggap menguntungkan tergantung pada kondisi saat ini dari konstituen terkait. Jika konstituen merasa keadaan saat ini dapat di terima, mungkin ada kecenderungan yang lebih tinggi untuk memilih petahana/*Incumbent*. Jika konstituen tidak menyetujui situasi yang di hasilkan dari kebijakan atau tindakan petahana/*Incumbent* mereka mungkin cenderung tidak akan memilihnya.

Petahana pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009 dan merupakan istilah baru di bidang politik, setara dengan istilah "*Incumbent*" dalam bahasa Inggris.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), *Edisi ke IV. Terbitan 2008*

Perancang istilah itu adalah ahli bahasa Salomo Simanungkalit, yang menulis untuk kolom bahasa di surat kabar Kompas.⁸

Istilah "*Incumbent*" dalam bahasa Inggris mengacu pada seseorang yang saat ini memegang jabatan setelah terpilih kembali untuk mempertahankan posisinya. Istilah tersebut juga berarti bahwa jika ada *Incumbent* untuk suatu jabatan, itu juga berarti ada penantang yang ingin menduduki jabatan tersebut. Istilah bahasa Inggris ini berasal dari bahasa Latin.

Dalam konteks pencalonan *Incumbent* dalam sebuah pemilu tentu membutuhkan beberapa modal yang kemudian dapat menjadi satu kekuatan dalam meraup dukungan atau suara masyarakat. Modal- modal tersebut yakni modal sosial dan modal politik.

Modal sosial merupakan modal yang didapatkan oleh *Incumbent* selama menduduki suatu jabatan. Dalam artian, bagaimana selama masa jabatannya dia membangun interaksi yang baik dengan masyarakat, baik itu masalah pembangunan, pendidikan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Melalui posisinya para *Incumbent* itu akan berusaha membuat kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk memberi kesan kepada para pemilih bahwa mereka menaruh perhatian yang besar kepada rakyat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Anthony Downs, pemerintah akan berusaha memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya, khususnya kekuasaan didalam mengalokasikan dan mendistribusikan kekuasaan untuk memperoleh simpati dari para pemilih. Disamping itu dimaksudkan sebagai langkah untuk memenuhi janji-janji yang

⁸ <https://rubrikbahasa.wordpress.com/2009/02/06/presiden-petahana/>

pernah diucapkan sebelum menjabat, orientasi kebijakan seperti itu dimaksudkan sebagai bukti kepada para pemilih bahwa para *Incumbent* itu memang layak untuk dipilih.

Petahana/*Incumbent* Menurut gaddes bahwasanya seorang yang sudah pernah mencapai puncak eksklusif (*Incumbent*) akan senantiasa memilih untuk melanjutkan karir mereka dibidang politik. Hal tersebut yang menjadikan *Incumbent* akan berusaha membentuk strategi untuk dapat melanjutkan karir mereka yang dimana hal tersebutlah yang memaksa *Incumbent* memunculkan pilihan rasioanl ynag nantinya digunakan sebagai alat untuk merealisasikan strateginya tersebut.

2.3 Elektabilitas

Dalam konteks ilmu politik, *Elektabilitas* dapat diartikan sebagai tingkat ketertarikan masyarakat umum terhadap figur politik, partai, atau lembaga politik. hal ini juga meliputi kemungkinan masyarakat untuk memilih partai tersebut.

Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. *Elektabilitas* bisa diterapkan kepada barang, jasa maupun seseorang, badan atau partai. *Elektabilitas* sering dibicarakan menjelang pemilihan umum. *Elektabilitas* berbeda dengan popularitas, Popularitas tingkat keterkenalan. *Elektabilitas* beriringan dengan popularitas. Sesuatu yang populer lebih tinggi tingkat *elektabilitas*. Sebaliknya, meskipun memiliki *elektabilitas* tapi tidak populer, persentase keterpilihannya juga rendah. *Elektabilitas* partai politik berarti

tingkat keterpilihan partai politik dipublik. Untuk meningkatkan *elektabilitas*, maka objek *elektabilitas* harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga populer.⁹

Semakin tinggi nilai elektabilitas yang dimiliki seorang ilmu figur politik, maka semakin tinggi pula kemungkinan ia untuk dipilih oleh masyarakat sebagai pejabat dalam pemilihan. Adapun cara untuk meningkatkan *elektabilitas* yang dimiliki oleh suatu figure atau partai politik adalah:

- (1) Dikenal baik oleh masyarakat.
- (2) Memiliki rekam jejak yang baik dibidangnya.
- (3) Memiliki kinerja yang baik.
- (4) Memiliki prestasi selama bekerja.

Kinerja dan popularitas sewaktu menjabat dipemerintahan dinilai dapat mempengaruhi *elektabilitas* seorang figur politik.

2.4 Perbandingan Politik

Perbandingan politik adalah salah satu cabang studi politik (study of politics) dan ilmu politik (political science). Study perbandingan politik (comparative politics) mempelajari kegiatan-kegiatan politik dalam cakupan lebih luas, termasuk mengenai pemerintahan (antara lain adalah suku bangsa, masyarakat, asosiasi-asosiasi dll). Oleh sebab itu, para spesialis perbandingan politik cenderung mengartikan perbandingan politik sebagai study tentang segala sesuatu yang berbau politik.¹⁰

Studi perbandingan politik berevolusi dari masa kemasa meskipun tetap berpusat pada perbandingan sistem politik dan pemerintahan di berbagai negara. Dimulai sejak tahun 1950, studi ini bahkan dinilai lebih tua karena metode

⁹ Jasmariyadi, Gejala politik sosial. Bandung: Yayasan pustaka Obor Indonesia. 2011

¹⁰ Indah novitasari, M.Si (han) ; buku materi pembelajaran perbandingan politik. 2021

perbandingan menjadi metode tertua yang digunakan dalam analisa politik, terlebih ketika Aristoteles sudah menggunakan metode ini dalam menjawab pertanyaan penelitian dalam studi politik yang dikaji (Pradesh, 2018). Studi perbandingan politik itu sebenarnya sudah sangat tua, bahkan sama tuanya dengan politik itu sendiri, sebagaimana disebutkan diatas. Hal yang memberikan warna baru adalah pendekatan dan metode ilmiah yang mendukungnya.

Pembandingan berbagai negara dengan berbagai sistem politiknya merupakan salah satu bidang analisis politik yang menarik dan penting. Apalagi bila dikaitkan dengan pesatnya perkembangan jumlah dan aneka jenis sistem politik di dunia beberapa abad terakhir. Setidaknya saat ini terdapat lebih dari 190 negara- bangsa dengan beragam karakteristik sistem pemerintahan. Studi perbandingan dapat membantu peneliti untuk memahi cara kerja sistem politik, ciri-ciri sistem politik, perbedaan stabilitas antara satu sistem dengan sistem lainnya, serta menjelaskan fenomena yang terjadi dalam sebuah masyarakat.

Dalam pengertian ini, politik berarti kekuatan politik. Ini melibatkan studi tentang semua lembaga pemerintah serta non-negara, melalui mana politik proses dibuat operasional. Proses politik tergantung pada sinyal dan informasi yang diterimanya dari lembaga non-negara. Ini selanjutnya mengubah sinyal-sinyal ini dan informasi menjadi nilai-nilai otoritatif. Politik, karenanya, melibatkan studi tentang kekuasaan dan relasi kekuasaan dalam masyarakat karena ini adalah perebutan kekuasaan dan proses dari reosulis konflik yang terjadi dengan menggunakan kekuasaan yang sah.

Dengan demikian studi perbandingan sistem politik merupakan kunci untuk memahami sejumlah sistem politik. Ada beberapa upaya lebih baru untuk mengatasi masalah teoritis dan metodologis dalam perbandingan politik yang patut disesuaikan. Maurice Duverger, menawarkan suatu pendahuluan yang bermanfaat bagi para pembaca. Pertama, ia menggali gagasan dasar ilmu sosial, dan melacak perkembangan historis ilmu-ilmu sosial tersebut. Kemudian, menguraikan dan membahas teknik observasi yang berkaitan dengan kajian terhadap dokumen-dokumen tertulis, statistik serta penggunaan metode kuisioner dan wawancara. Ketiga, menelaah penggunaan teori dan hipotesis, dan juga klasifikasi serta konseptualisasi dalam penelitian yang paling penting adalah bagaimana politik juga berkembang.

Perbandingan politik berupaya melakukan analisis perbandingan dari struktur dan proses dari sistem politik yang ada di berbagai belahan dunia, sehingga hal ini menjadi bagian penting bagi pembelajaran ilmu politik. M.G. Smith menyatakan bahwa perbandingan politik merupakan studi yang mempelajari bentuk dari organisasi politik, korelasi, variasi hingga bentuk perubahannya.

Perbandingan politik juga fokus pada aturan/regulasi yang signifikan, perbedaan dan persamaan cara kerja lembaga politik dan perilaku politik.

Perbandingan politik berusaha untuk menganalisis dan membandingkan perbedaan sistem politik yang bekerja di bawah masyarakat yang berbeda. Oleh karena itu, perbandingan politik menganalisis keterkaitan tiga unsur penting, sebagai berikut:

- a. Aktivitas politik b. Proses politik c. Kekuatan politik

Perbandingan politik dalam Teori pilihan rasional ini menekankan bahwa aktor menjadi kunci terpenting di dalam melakukan sebuah tindakan. Aktor disini bisa dikatakan sebagai individu atau Negara yang melakukan suatu tindakan untuk mencapai kepentingannya dan berusaha memaksimalkan kepentingannya. Hal tersebut dilakukan oleh aktor dengan cara mengambil atau memilih suatu pilihan yang dianggap membawa hasil untuk mencapai kepentingannya tersebut. Sebagai contoh, jika pilihan 1 dianggap lebih penting dan lebih bermakna dari pada pilihan 2, dan 3, maka aktor akan memilih pilihan 1. Aktor disini ialah individu, yaitu individu yang melakukan sebuah tindakan. Aktor tersebut dapat mengatur dirinya sendiri, karena aktor tahu apa yang ia mau dan yang harus dilakukan. Teori pilihan rasional merupakan alat untuk berpikir logis, berfikir rasional, didalam membuat suatu keputusan. Sama halnya dengan para petani miskin yang memilih suatu pilihan yang dianggap paling rasional (sesuai dengan akal) dibandingkan dengan pilihan-pilihan lainnya untuk tetap dapat mempertahankan hidupnya dan menyambung kehidupannya. Strategi atau cara yang diambil merupakan suatu hal yang telah dipikirkan dan dipertimbangkan sebelumnya hingga pada akhirnya menjadi suatu keputusan yang dipandang sangat rasional. Teori pilihan rasional merupakan alat untuk berpikir logis, berfikir rasional, didalam membuat suatu keputusan. Sama halnya dengan para petani miskin yang memilih suatu pilihan yang dianggap paling rasional (sesuai dengan akal) dibandingkan dengan pilihan-pilihan lainnya untuk tetap dapat mempertahankan hidupnya dan menyambung kehidupannya. Strategi atau cara yang diambil merupakan suatu hal yang telah

dipikirkan dan dipertimbangkan sebelumnya hingga pada akhirnya menjadi suatu keputusan yang dipandang sangat rasional.

Beberapa orang petahana yang kembali berpasangan dengan wakilnya wakilnya, beberapa orang pecah kongsi, beberapa orang petahana yang maju tanpa penantang. Baik karna memang maju tanpa penantang. Baik karna memang dia sangat berhasil di periode sebelumnya. Pilkada hakekatnya mengajak orang untuk memilih, baik petahana maupun penantang, yang dijual tentu program. Lewat program itu rakyat menumbuhkan harapan.

Bagi petahana setidaknya dia sudah punya modal memadai. Lima tahun adalah waktu yang lebih dari cukup untuk meyakinkan rakyat dengan program-program yang telah dilakukannya. Apalagi jika program-program itu sangat dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Hasil kerja itu menjadi “success story”. Pembangunan fisik yang sudah dibuat tentu menjadi kebanggaan warganya. Itu akan menjadi ingatan kolektif rakyatnya.

Lalu bagaimana dengan penantang, apakah peluang penantang sangat kecil untuk menumbangkan petahana, jawabannya adalah tidak. Banyak kejadian, petahana tumbang oleh penantang. Sebabnya sederhana. Hasil kerja petahana selama 5 tahun tidak dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Tidak ada sesuatu yang spektakuler yang petahana lakukan. Bekerja sekedar “program as usual”.

2.5 Komunikasi politik

Komunikasi Politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan,

komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara "yang memerintah" dan "yang diperintah". Menurut Gabriel Almond (1960): komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Komunikasi politik adalah suatu proses penyampaian pesan politik dari pasangan calon legislatif berupa materi-materi kampanye dalam kampanye pemilu 2019 melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat.

Komunikasi politik merupakan faktor yang esensial sebagai salah satu pendukung pembangunan. Semua kegiatan politik yang dilakukan pemerintah dan elit lainnya dalam kekuasaan negara, tidak bisa lepas dari komunikasi politik. Namun yang menjadi persoalan tidak semua individu, kelompok maupun entitas lain dalam kehidupan bernegara peduli terhadap pola komunikasi yang dilakukan di suatu komunitas. Terlebih lagi di lingkungan pedesaan, secara historis pola komunikasi yang sering dilakukan oleh para elite berkuasa justru bersifat koeratif.

Ada beberapa komponen penting yang terlibat dalam proses komunikasi politik, Komunikasi politik terdiri dari berbagai unsur, antara lain:

a. Komunikator Politik

Komunikator politik adalah mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna mengenai politik. misalnya presiden, menteri, anggota DPR, politisi, dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan.

b. Pesan Politik

Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun nonverbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung politik. Misalnya pidato politik, pernyataan politik, buku, brosur dan berita surat kabar mengenai politik, dll.

c. Saluran atau Media Politik

Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya media cetak, media elektronik, media online, sosialisasi, komunikasi kelompok yang dilakukan partai, organisasi masyarakat, dsb.

d. Sasaran atau Target Politik

Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai atau kandidat dalam Pemilihan Umum. Mereka adalah pengusaha, pegawai negeri, buruh, pemuda, perempuan, mahasiswa, dan sebagainya.

e. Pengaruh atau efek Komunikasi Politik

Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, keaktifan masyarakat dalam partisipasi politik, dimana nantinya akan berdampak pada pemberian suara dalam Pemilihan Umum.

Dalam membangun kesan, peran komunikasi politik sangat penting. Pengusung calon atau partai yang akan di ikutkan pemilihan bisa membangun citra melalui komunikasi ini. Kampanye sebagai komunikasi politik sangat

penting karna bertujuan untuk memperkenalkan kandidat kepada masyarakat. Melalui kampanye citra partai dan politikus ditampilkan.

Mencermati masyarakat kita saat ini, tampaknya mulai ada pergeseran, terutama pada komunikasi politik. Meskipun diawal-awal reformasi teori jarum hipordemik tampak begitu perkasa mempengaruhi masyarakat- yang konon dinegara-negara maju sudah lama ditinggalkan-dimana popularitas menjadi faktor utama. masyarakat secara umum sudah mulai kritis, dimana popularitas dalam *elektabilitas* calon pemimpin tidak lagi menjadi penentu utama pilihan rakyat.

Pembicaraan politik merupakan kegiatan simbolik yang dihubungkan dengan:

1, Lambang. 2. Bahasa. 3, Opini public.

Ketiga faktor itu selalu melekat pada pesan-pesan politik yang disebarkan oleh komunikator politik kepada masyarakat dalam upaya untuk mencapai tujuan politik.

Sedangkan Walter Lippman menyatakan opini publik dalam konteks komunikasi politik ditekankan kepada peran komunikator dalam menciptakan opini public untuk mempengaruhi masyarakat. Opini publik adalah kumpulan pendapat orang tentang suatu peristiwa, kasus, masalah, yang memepengaruhi, melibatkan dan menarik minat khalayak atau komunitas maupun masyarakat.¹¹

2.6 Pemilihan Umum

Pemilu adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beranekaragam, mulai dari presiden,

¹¹ Ibid

wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan. pada konteks yang lebih luas, pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua osis atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata pemilihan lebih sering digunakan.

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorik, publik relation komunikasi massa, lobby dan lain-lain.

Dalam pemilu para pemilih dalam pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye.

Menurut para ahli, pemilihan umum itu secara teknis berjalan, Umarudi Masdar menyatakan bahwa pemilihan itu dia definisikan dari segi teknis pelaksanaan. Ia mengungkapkan bahwa pemilu adalah suara rakyat dengan cara memilih wakil rakyat, dan menurut Adrew Reynold, secara umum pemilu adalah konversi suara yang diperoleh dalam pemilu menjadi satu untuk memperebutkan kursi. Macam metodenya. Partai politik dan kandidat.

Pemilu di berbagai negara biasanya digelar setiap empat atau lima tahun sekali. Misalnya, Indonesia mengadakan pemilihan umum setiap lima tahun.

Pemilihan umum yang kemudian disebut dengan pemilihan umum adalah sarana untuk menjalankan kedaulatan rakyat di dalam negara kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum suatu negara biasanya berpedoman pada regulasi, baik regulasi tertulis maupun regulasi non tertulis. Di Indonesia, penyelenggaraan

pemilu terutama berpedoman pada peraturan perundang-undangan, yaitu berbagai bentuk peraturan mengikat yang dirumuskan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Pengaturan tertinggi adalah UUD 1945, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia harus berpedoman pada dan berpedoman pada aturan yang diatur dalam UUD 1945.

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu dalam pasal 3 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemilu harus berdasarkan pada asas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

- a.mandiri, b. jujur, c.adil,
- d.berkepastian hukum, e tertib

Penentuan yang akan menjabat sebagai pejabat pemerintah (dalam hal ini pemimpin daerah), setiap negara dipengaruhi oleh sistem politik, sistem pemilu, kondisi politik masyarakat, metode pemilu, serta prosedur dan mekanisme politik yang dianut. Dalam sistem politik yang demokratis, pemilihan dan pemilihan pejabat pemerintah lebih didasarkan pada keinginan politik masyarakat, baik melalui partai politik maupun melalui jalur pribadi.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Rakyat.” Pengertian kedaulatan sama dengan kekuasaan yang tertinggi, artinya, kekuatan tertinggi ada di level kekuatan tertinggi. Tidak ada pasal yang dapat memastikan bahwa Republik Indonesia adalah negara demokrasi. Namun karena perwujudan kedaulatan rakyat tidak

lebih dari demokrasi, maka secara implisit dapat dikatakan bahwa Republik Indonesia adalah negara demokrasi.

Tujuan penyelenggaraan pemilu adalah agar wakil rakyat benar-benar dipilih oleh rakyat, dari rakyat, dan akan bekerja untuk kepentingan rakyat. Begitu pula dengan pemilihan presiden, wakil presiden, dan legislatif. Dan membentuk pemerintahan baru dan perwakilan rakyat yang benar-benar berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adapun tujuan pemilihan yang harus dicapai antara lain:

- a) Menjalankan kedaulatan rakyat;
- b) Mewujudkan hak asasi politik rakyat;
- c) Pemilu Republik Demokratik Rakyat, Partai Demokrat, dan perwakilan rakyat dari Partai Demokrat, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden;
- d) Pergantian aparatur pemerintah dilakukan secara damai, aman dan tertib (sesuai konstitusi);
- e) Menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.

Pemilu harus dilakukan secara jujur, adil dan demokratis. Agar pemilu mencapai level ini, diperlukan beberapa syarat atau prasyarat untuk mendukungnya. Kondisi ini digunakan untuk menyelenggarakan pemilu yang berkualitas, sehingga diperoleh pejabat publik yang legal. Syarat minimal pemilu bebas dan adil. Indikator ini digunakan untuk menilai apakah sistem pemilu cocok untuk suatu negara. Indikator tersebut adalah: akuntabilitas, keterwakilan, keadilan, persamaan hak untuk setiap pemilih (kesetaraan), regionalitas, reliabilitas, angka.

Pemilu merupakan kehendak mutlak negara Indonesia setelah terbentuknya sistem demokrasi. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945, pemilu merupakan wujud kedaulatan rakyat. Kedaulatan yang mencerminkan maksud dan tujuan pemilu, yaitu:

a. Sebuah. Pemilihan wakil rakyat untuk berpartisipasi di badan perwakilan rakyat pusat, daerah, dan daerah;

Pemilihan wakil daerah yang akan mengikuti pemilihan badan perwakilan daerah (DPD)

b. Membentuk pemerintahan yang demokratis dan kuat yang mendapat dukungan (hukum) terbesar dari rakyat.

Pemilu di Indonesia memperhatikan eksistensi UUD 1945, yang di dalamnya terwujud kedaulatan rakyat dalam suatu negara melalui penyelenggaraan sistem demokrasi. Perlu ditekankan bahwa pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem pemilihan proporsional. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, undang-undang tersebut mengatur pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, sehingga disepakati untuk memilih sistem proporsional terbuka.

Sistem proporsional terbuka ini merupakan sistem di mana pemilih/masyarakat dapat secara langsung memilih calon wakilnya untuk memperoleh kursi parlemen. Dengan begitu, perwakilan rakyat bisa lebih dekat dengan pemilihnya, sehingga rasa tanggung jawab mereka dalam menjalankan fungsinya kepada rakyat menjadi semakin realistis. Artinya, rakyat yang diwakili bisa meminta wakilnya untuk melakukan yang terbaik untuk rakyat. Jika tidak

memenuhi syarat, maka wakilnya akan dihukum agar tidak terpilih kembali pada pemilihan umum berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada
- Antar, Venus. 2004. *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, Bandung: Simbiosis Rektana Media
- Arifin, Anwar, and M. Iqbal Latief 2006, *Pencitraan dalam politik: strategi pemenangan pemilu dalam perspektif komunikasi politik*. Pustaka Indonesia,
- Budiardjo, Miriam 2003, *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama
- Dharma, Fitra 2022, *Kinerja Pemerintah Daerah dan Political Budget: Pengaruhnya terhadap Perolehan Suara Incumbent pada Pemilukada*. Penerbit NEM.
- Gumilang, Adhi Panjie 2018, *Studi Pemikiran Sistem Politik*.
- Gaddes. *Pola Rekrutmen PDIP, Nasdem dan PSI dalam Pemilihan Caleg DPRD di Kota Denpasar*
- Andre Restiana 2016, *Peneliti Lintas Studi Demokrasi Lokal*. Bangka Belitung.
- Gusrini, Vivi R. Pohan, *Pemecahan Konflik Interpersonal Pada Remaja yang Populer*. Sumatera Utara.
- H.M.Burhan Bungin 2007, *Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan publik dan Ilmu sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Susanto, Eko Harry 2019. *Komunikasi politik dan otonomi daerah: tinjauan terhadap dinamika politik dan pembangunan*. Mitra Wacana Media.
- Indah novitasari, M.Si (han) 2021, *buku materi pembelajaran perbandingan politik*.
- Iskandar 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.pertama, Jakarta : Gaung Persada.

- Jasmariyadi 2011, *Gejala politik sosial*. Bandung:Yayasan pustaka Obor Indonesia.
- Lexy J Moleong 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Rosda Karya.
- Yunus, Muh. “*Pengaruh Elit Politik Terhadap Elektabilitas Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat Dapil 2 Pada Pemilu 2014 di Kota Makassar.*”
- Nur, Alia Fitra 2016, *Survei Korelasi Antara Motivasi Pencarian Popularitas dan Perilaku Berinstagram*. Yogyakarta.
- Saat, Sulaiman dan Mania, Sitti 2019, *Pengantar Metodologi Penelitian* .Gowa: Pusaka Almaida.
- Soekanto, Soerjono 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas Indonesia,
- Suryana, N. (2013). Iklan Politik, Popularitas, dan Elektabilitas Calon Presiden dan Wakil Presiden 2014. *Observasi*, 11(2).

Jurnal

- Agus 2018, *Incumbent di Mata Pemilih*;Jurnal Politik Islam.Vol.19(Jan-Jun) hlm.20-35
- Amanda J Rose 2002. *Jurnal Hubungan sosial dan pribadi*
- Arbi, Purnomo, Ibrahim Ibrahim, and Bahjatul Murtasidin 2023, "*Modalitas Politik Incumbent di Pilkades (Studi terhadap Kemenangan Aminanto di Pilkades Sidoharjo-Bangka Selatan).*" *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 9.1 : 171-178.
- Harahap, Insan Harapan 2020, "*Kampanye Pilpres 2019 Melalui Media Sosial dan Pengaruhnya terhadap Demokrasi Indonesia.*" *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 17.01
- Haryanto 2014, *Analisis Perilaku Pemilih dalam Politik Lokal di Indonesia*; Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Khoiron, Khoiron 2018, "*Kemenangan petahana (incumbent), pada pemilihan kepala daerah 2015;(Strategi Politik dan Marketing Politik Pada Pilwali Kota Surabaya dan Pilbup Kab. Malang).*" Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik 3.1: 1-10.

Robert B Zajonc 2017, *Mencermati pilihan rakyat antara popularitas dalam integritas semu*;Jurnal RISALAH vol. 28, no. 2, hal 70-74

Utomo, Tri Cahyo, and Edi Santosa 2014, "*Pengaruh Tingkat Identifikasi Partai Dan Citra Kandidat Terhadap Perilaku Memilih Dalam Pilgub Jateng 2013 (Studi Persepsi Masyarakat Di Kelurahan Bringin, Semarang).*" Journal of Politic and Government Studies 3.2 : 1-15.

Artikel/Internet:

[http://bekasi.pikiran-rakyat.com.\(komunikasi politikdikutip/](http://bekasi.pikiran-rakyat.com.(komunikasi politikdikutip/)

[https://Hukum-online.com.\(Incumbent dimata pemilih\).](https://Hukum-online.com.(Incumbent dimata pemilih).)

<https://rubrikbahasa.wordpress.com/2009/02/06/presiden-petahana/>

Kamus besar bahasa Indonesia, Edisi ke IV. Terbitan 2008

Shahreza, M. (2018). *Pengertian Komunikasi Politik.* 1–25.
<https://doi.org/10.31227/osf.io/v48x2>

Tribun Majene.com. 2019. *Sejumlah Petahana Tumbang di Dapil 2 Majene.* (Media Online)

Peraturan dan Undang-undang

UU Nomor 7 Tahun 2017, *Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.*

Lain-lain:

Sondakh, (2018) Skripsi. *Pengaruh Citra Politik Terhadap Elektabilitas Calon Bupati di Kabupaten Luwu*

Sukipli (2014) *strategi komunikasi politik para Incumbent dalam menghadapi pemilihan legislative periode 2014-2019 di daerah pemilihan kecamatan somba opu di kabupaten gowa*.Gowa.Universitas:Muhammadiyah Makassar.

Tommy Mandala Putra.(2020). *Pengaruh Isu Lokal Terhadap Elektabilitas Calon Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Margomulyo Kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro Tahun 2019*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya